

Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Sosial Dalam Verifikasi dan Validasi Data Penerima Dana Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru

LALA TAMRIN^{1*}; ZULKARNAINI²

Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293

*E-mail : lalatamrin.20@gmail.com (korespondensi)

Abstract: Social assistance funds in Indonesia are disbursed based on Integrated Social Welfare Data (DTKS) where DTKS is the main data used by the Ministry of Social Affairs and Regional Governments, in this case the District/City Social Service, which is authorized to manage this data. The theory used in this study is the theory of work effectiveness by Admosoeprapto (in Amelya, 2022) with 5 (five) indicators: Goal Achievement, Work Quality, Work Quantity, Timeliness and job satisfaction. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the work of Social Service employees in verifying and validating data on recipients of social assistance funds in Pekanbaru City. By using a qualitative research method with a phenomenological approach that is descriptive in nature, using data collection techniques by observation, interviews, and documentation. The results of the research that the author gets are that the work of Social Service employees is considered ineffective in verifying and validating data on recipients of social assistance funds, where there are still several factors that become obstacles experienced by the Pekanbaru City Social Service, causing the verification and validation of the data to be ineffective. The suggestion from this research is that cooperation, coordination and harmonization are needed between the central and regional governments so that the data produced is right on target, effective and efficient and supported by a good, integrated, transparent and accountable system in the distribution of social assistance.

Keywords: *Integrated Social Welfare Data (DTKS), verification and validation, work effectiveness.*

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pemerintah melaksanakan berbagai program peningkatan kesejahteraan penduduk. Namun, terkadang program peningkatan kesejahteraan penduduk tidak berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan tidak tepatnya sasaran yang disebabkan oleh data identifikasi target yang kurang akurat (Susanto et al., 2021).. Seringkali ditemukan terjadi kesalahan dalam menentukan kelayakan penerimaan bantuan. Masalah seperti ketidak tepatan sasaran penerimaan bantuan ini tentunya harus segera diatasi dan dicari solusinya agar tidak terulang lagi pada program-program bantuan di masa yang akan datang (Arief & Zulkarnaini, 2017).

Masalah ketidak tepatan sasaran penerimaan bantuan seringkali terjadi pada berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali pada Provinsi Riau khususnya di

Kota Pekanbaru. Berdasarkan data saat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) melakukan pengecekan langsung penyaluran bantuan sosial di Kota Pekanbaru, pada kesempatan itu Kemendagri menyumbang secara acak masyarakat yang dikira perlu mendapatkan bantuan layak untuk menerima bansos dari pemerintah, dan didapati ada warga yang seharusnya layak mendapatkan bantuan sosial akan tetapi belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Saat ini Kementerian Sosial melaksanakan program bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini sesuai dengan UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 11 (2) yang menyebutkan bahwa Data Terpadu yg telah ditetapkan

menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan sosial. Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk pembagian penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial menjadi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing. Tugas pemerintah pusat adalah pengelolaan data fakir miskin nasional, tugas pemerintah daerah provinsi adalah pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi, sedangkan tugas pemerintah daerah kab/kota adalah pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/Kota. Sehingga kewajiban dalam melakukan update DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) melalui proses verifikasi dan validasi data adalah pemerintah daerah kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial yaitu Dinas Sosial Kab/Kota (Afrizal, 2018).

Adapun alur mekanisme dari proses penambahan atau penggantian verifikasi dan validasi untuk pendataan penerima bantuan sosial akan dijelaskan berdasarkan Undang-undang Permensos Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial nomor 3 tahun 2021 pasal 4-9. Berkaitan dengan kerja Pegawai di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pendataan penerima dana bantuan sosial kepada masyarakat di Kota Pekanbaru, masih terdapat keluhan-keluhan masyarakat terkait proses pendataan penerima dana bantuan sosial tersebut. Karna nyatanya dilapangan masih terdapat orang kaya bahkan penerima bantuan sosial yang sudah meninggal dunia. Hal ini tentu menjadi penilaian dimana kerja pegawai dinilai tidak transparan dalam pengelolaan data penerimaan bantuan sosial ini.

kerja organisasi dapat dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan ketika program yang telah dibuat terlaksana secara optimal dengan hasil yang memuaskan. Keberhasilan suatu organisasi/tidak lepas dari kerja yang baik dari anggota organisasi tersebut, baik dari

kerja individu maupun dari kerja tim (Sulfiani, Andi Ni'mah, 2019).

Masyarakat meminta pemerintah selayaknya lebih proaktif dalam bekerja dan tidak membuat masyarakat semakin marah mengenai persoalan tidak valid nya data penerima bantuan sosial supaya tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat bahwa data tersebut tidak diperbaharui apabila. Dinas Sosial Kota Pekanbaru berpatokan pada data yang notabennya berasal dari data pusat DTKS, padahal Dinas sosial memiliki peran dan berwenang sebagai pengelola data yang berhak mengganti data KPM, menyalurkan, memantau dan melaporkan penyaluran bantuan sosial kepada Pusat.

Berhubungan dengan masalah diatas maka tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui efektivitas kerja pegawai Dinas Sosial dalam verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial agar tepat sasaran penyaluran dana bantuan sosial kepada masyarakat Kota Pekanbaru.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Dengan pendekatan fenomenologi yang berifat deskriptif, dengan hal ini penulis dapat memaparkan mengenai fenomena proses kerja pegawai yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pembaruan data penerima bantuan sosial berupa memverifikasi dan memvalidasi agar tepat sasaran. Hasil dari penelitian akan dianalisa dengan cara menganalisis teori-teori yang telah dipaparkan sehingga dari penelitian ini akan diperoleh kesimpulan dari fenomena ini.

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan sebagai sumber informasi dari pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Informan adalah seseorang yang menjadi narasumber dalam penelitian untuk memberikan keterangan dan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data

yang dibutuhkan dalam penelitian. Untuk memperoleh informan dari penelitian ini, peneliti menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah metode yang informannya dipilih karena memiliki informasi yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2018:96).

HASIL

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan analisis terhadap data-data yang telah didapatkan melalui observasi serta hasil wawancara kepada informan dan juga telah melakukan observasi di lapangan terhadap penelitian yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Pada uraian dan penjelasan peneliti dibagian bab-bab sebelumnya, peneliti telah memaparkan tentang bagaimana Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Sosial dalam Memverifikasi dan Memvalidasi Data Penerima Dana Bantuan di Kota Pekanbaru.. Berjalannya tugas dari dinas sosial dalam hal memeverifikasi dan memvalidasi data penerima dana bantuan sosial ini didasari oleh peraturan Undang-Undang Permensos Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial nomor 3 tahun 2021.

Adanya wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam hal ini yaitu dinas sosial kab/kota bertujuan untuk menciptakan basis data terpadu yang valid akan kebenarannya sehingga penyalur dana bantuan sosial yang berpatokan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat tepat sasaran. Dengan adanya observasi lapangan yang peneliti lakukan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu untuk melihat proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap adanya wewenang Dinas Sosial dalam memverifikasi dan memvalidasi data penerima dana bantuan sosial, serta mewawancarai beberapa infroman yang terlibat dalam proses memverifikasi dan memvalidasi data penerima dana bantuan sosial di Kota Pekanbaru.

Hasil yang ditemukan bahwasannya efektivitas kerja pegawai di Dinas Sosial

belum terlaksananya dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari perubahan data yang masih minim dan jarang adanya perubahan pada data yang sudah ada. Setelah penulis melakukan wawancara dan observasi secara langsung terdapat beberapa kendala yang membuat hasil kerja yang dilakukan oleh Dinas sosial Kota Pekanbaru menjadi kendala salah satunya adalah karena kerja sama antara pihak pusat yakni Kementerian Sosial dengan Pihak daerah hal ini Dinas Sosial sendiri belum terjalin dengan baik dan kompak. Dimana Tugas dari Dinas Sosial dalam mengupdate data tidak ditindaklanjuti oleh pihak pusat. Data yang sudah diupdate oleh Dinas Sosial yang kemudian diserahkan ke pusat, dimana pusatlah yang menjadi penentu akhir dalam penetapan data penerima bantuan sosial. Selain kendala diatas masih ada beberapa kendala dari pegawai Dinas Sosial dalam melakukan verifikasi dan validasi data penerima dana bantuan sosial di Kota Pekanbaru sehingga memepengaruhi efektivitas kerja mereka.

PEMBAHASAN

Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Sosial Dalam Verifikasi dan Validasi Data Penerima Dana Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru

Pencapaian Tujuan

Dalam pencapaian tujuan ini Dinas Sosial melaksanakan pendataan data berdasarkan aturan kerja yang sudah ditetapkan oleh Kemensos yakni cakupan diperluas menjadi 60 persen terendah pengusulan dibuka setiap bulan, akan tetapi kenyataan dilapangan perubahan data yang dihasilkan masih jauh dari yang diharapkan. Dimana sedikit masih perubahan data yang terjadi mengingat aturan kerja yang telah ditetapkan oleh Kemensos.

Kenyataan dilapangan yang ditemui khususnya di Kota Pekanbaru sendiri masih banyaknya penerima bantuan sosial yang belum tepat sasaran dan masih adanya masyarakat yang layak akan menerima bantuan sosial tetapi belum merasakan

bantuan tersebut. Akan tetapi ternyata ditemukan salah satu kendala dimana kerja sama antara daerah dan pusat tidak berjalan dengan baik karena disaat petugas yang sudah melakukan verifikasi data dan melaporkan perubahan data akan tetapi pihak pusat yang berwanang dalam menetapkan data akhir, hal ini tentunya mempengaruhi hasil akhir dari dilaksanakannya verifikasi dan validasi data penerima dana bantuan sosial di Kota Pekanbaru.

Kualitas Kerja

Dalam mengukur kualitas pekerjaan ini dilakukan dalam tiga proses yaitu pada tingkat proses, tingkat output dan tingkat outcome, sehingga dalam mengukur kualitas pekerjaan pegawai tidak hanya terpaku pada outputnya saja. Tetapi bagaimana proses penyelesaian pekerjaan itu dan bagaimana tingkat outcome nya apakah akan memberikan manfaat kedepannya ataupun tidak.

Terhadap kualitas pekerja pegawai di Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menggambarkan hasil pekerjaan pegawai masih kurang memuaskan karena masih terdapat kekurangan dan masih adanya permasalahan saat melakukan proses verifikasi dilapangan. Permasalahan yang terjadi tersebut disebabkan oleh waktu pengerjaannya yang bisa dibilang tidak ideal dan kurangnya pemahaman dari pihak terkait dalam hal ini pihak kelurahan yang dimana masih adanya peran kelurahan dalam persoalan pendataan ini. Seharusnya disini pihak atasan dimana dari instansi yakni Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab atas petugas yang turun kelapangan seharusnya melakukan pengawasan dan memberikan sosialisasi dan penyuluhan untuk dapat memberikan contoh bagaimana seharusnya pekerjaan itu siap tepat waktu sesuai yang telah ditentukan dan juga melaksanakan sosialisasi kepada pihak kelurahan agar dapat bisa bekerjasama dengan pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Kuantitas Kerja

Dalam penelitian ini Aspek Kuantitas adalah aspek yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara jumlah yang dihasilkan, diberikan, atau diselesaikan dalam suatu tugas pokok seorang pegawai dengan target yang telah disepakati dalam tugas pokok tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh, dengan melihat target output pekerjaan dan hasil pencapaian tujuan yang dapat direalisasikan oleh pegawai maka dapat dilihat bahwa setiap pegawai telah menyelesaikan tugas dan pekerjaan dalam jabatannya sesuai dengan target pekerjaan yang telah ditetapkan walaupun memang ada keluhan dari petugas lapangan langsung sebab rentang waktu yang diberikan sedikit yakni hanya satu bulan saat proses verifikasi data.

Ini menunjukkan bahwa untuk kuantitas dari beban pekerjaan yang diberikan terhadap masing-masing pegawai menjadi masalah dan harus diatasi oleh instansi yang terkait dalam hal ini Dinas Sosial. Sehingga perlu mengurangi beban pekerjaan dan atau mungkin dapat menambah petugas baru jadi tidak lagi satu orang perkelurahan. Namun lebih jauh dalam mengukur aspek kuantitas ini, tentunya tidak hanya dilihat dari seberapa banyak ataupun seberapa besar beban kerja yang diselesaikan oleh pegawai setiap tahunnya, tentunya harus dikaitkan dengan aspek kualitas, waktu dan biaya sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan apakah pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pegawai dapat dikatakan telah memenuhi harapan dan menunjang pencapaian tujuan organisasi.

Tepat Waktu

Dalam penelitian ini pengukuran waktu penyelesaian belum mampu mengukur secara akurat, karena meskipun rata-rata pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, tetapi kadang masih terkendala dalam keterlambatan menyelesaikan kegiatan yang intensif seperti kegiatan yang dilakukan setiap bulan, trimester ataupun caturwulan,

disebabkan karena jumlah pegawai yang belum memadai dan juga keterbatasan yang dimiliki oleh pegawai dimana petugas yang melakukan pendataan langsung ditempatkan satu orang satu di setiap kelurahan dan kecamatan.

Kepuasan Kerja

Setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari tempatnya bekerja. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan.

Berdasarkan data yang didapatkan kepuasan para pegawai yang bekerja dalam memverifikasi dan memvalidasi data penerima dana bantuan sosial dinilai sudah cukup puas. Mereka bekerja berdasarkan tugas pokok yang sudah ada, menjalankan tanggung jawab dan mengharapkan upah dari pekerjaan mereka.

Faktor Penghambat Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Sosial Dalam Verifikasi dan Validasi Data Penerima Dana Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru

Kurangnya Sumber Daya Manusia

Ditematkannya satu orang petugas untuk satu kelurahan memang dinilai kurang optimalnya kerja yang dihasilkan. Pasalnya memang dari pandangan peneliti melihat bahwasannya petugas yang turun kelapangan untuk melakukan verifikasi ini mengalami kesulitan dan kewalahan dalam memverifikasi data penerima dana bantuan sosial.

Beban kerja yang diberikan kepada petugas dinilai cukup besar untuk melakukan verifikasi data seorang diri untuk setiap kelurahan. Pasalnya dilihat dari data masyarakat miskin di kecamatan Kota Pekanbaru bisa diperkirakan masyarakat miskin disetiap kelurahan sekitar 1000-3000

an penduduk kemudian ini dibagi 24 hari kerja dalam sebulan itu artinya dalam sehari petugas yang turun kelapangan untuk melakukan verifikasi data harus mendata kurang lebih 83-100 masyarakat miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ini masih merujuk pada data lama, belum termasuk data rekomendasi penerima baru.

Kurangnya Partisipasi Masyarakat dan Instansi Yang Terkait

Pelaporan pendaftaran, atau perubahan data dilakukan secara berjenjang dari tingkat pedesaan/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kotamadya, gubernur, sampai pada Menteri Sosial. Tapi kenyataan dilapangan memang dari tingkat kelurahan dan kecamatan belum adanya keterbukaan dan mau ikut campur dalam membantu dinas sosial dalam memverifikasi data penerima dana bantuan sosial. Belum lagi dari pihak pusat yakni Kemensos yang dinilai seperti acuh tak acuh mengenai perubahan data yang terjadi di daerah, padahal ditahap akhir pihak pusatlah yang memegang peran penting dalam penetapan data baru.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah peneliti uraikan dapat disimpulkan bahwa proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan efektif. Apabila dianalisis lebih dalam hasil yang didapatkan masih relatif indikasinya belum efektif dimana kerja dari Dinas Sosial masih banyak kendala yang didapatkan dilapangan saat melakukan pendataan untuk memverifikasi data, mulai dari beban kerja petugas yang melakukan verifikasi data yang dinilai cukup besar beban kerjanya dan melihat dari waktu kerja yang diberikan dinilai juga cukup sedikit hanya sebulan dengan beban kerja yang besar yakni satu kelurahan. Dan tidak hanya kekurangan tenaga kerja, tidak selarasnya kerjasama yang terjalin antara pemerintah pusat dan

daerah membuat ketidak efektif nya data yang dihasilkan.

Kompak, 15(1), 1.
<https://doi.org/10.33365/jtk.v15i1.915>

DAFTAR RUJUKAN

- Afrizal, D. (2018). *Dinas Sosial Analisis Kerja Birokrasi Publik pada Kota Dumai*. Sorot, 13(1), 53. <https://doi.org/10.31258/sorot.13.1.5655>.
- Amelya, Triana. "PENGARUH FASILITAS KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN RANCAH KABUPATEN CIAMIS Triana Amelya." (2022).
- Arief, I. S., & Zulkarnaini, Z. (2017). *Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Dikelurahan Maharatu Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Bintang, A. P., & Widowati, N. (2017). *Analisis kerja organisasi pada kantor Keca matan Blora*. Journal Public Policy and Manajement Review, 6 (2).
- Kadarisman, Muh. "Efektivitas Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi di Kota Depok." Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi 16, no. 1 (2019): 17-32.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sulfiani, Andi Ni'mah. "Kerja Pegawai Di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palopo."
- Susanto, E. R., Puspaningrum, A. S., & Neneng, N. (2021). *Model Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat*. Jurnal Tekno